

KEBIJAKAN DANA OPTIMALISASI DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2014

Juli Panglima Saragih*)



Abstrak

Dana Optimalisasi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam anggaran negara guna mendorong pembangunan di daerah. Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 merupakan tambahan dana untuk beberapa kementerian/lembaga yang membutuhkan dana untuk menunjang operasional pembangunan sesuai tupoksi, program, dan proyek yang diusulkan oleh kementerian/lembaga masing-masing. Oleh karena itu, Dana Optimalisasi bukan merupakan pos anggaran tersendiri seperti halnya Dana Otonomi dan Dana Penyesuaian yang setiap tahun dianggarkan dalam APBN. Sama dengan prinsip anggaran negara, penggunaan dana ini harus transparan dan akuntabel serta harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPK dan KPK perlu mengawasi penggunaan Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014.

A. Pendahuluan

Pemerintah dan DPR-RI telah menyepakati alokasi anggaran Dana Optimalisasi dalam APBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp27 triliun. Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 terdistribusi dalam anggaran belanja kementerian dan lembaga pemerintah. Dana ini berbeda dengan (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)) tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk daerah dan dimasukkan ke dalam APBD.

Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 untuk tambahan belanja bagi beberapa

kementerian/lembaga (K/L) pemerintah dianggarkan sebesar Rp27 triliun. Angka ini tergolong besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp11–13 triliun. Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 diperoleh dari penghematan subsidi listrik Rp11,18 triliun, tambahan belanja hasil panja asumsi Rp12,74 triliun, dan tambahan panja hasil panja belanja pemerintah Rp3,04 triliun. Dengan adanya Dana Optimalisasi ini, maka anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar Rp1.249,9 triliun, meningkat dari RAPBN Tahun 2014 sebesar Rp1.230,3 triliun.

*) Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, e-mail: saragihjulipanglima@yahoo.co.id



B. Urgensi Kebijakan Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar Dana Optimalisasi yang merupakan bagian dari APBN 2014 dijaga, terutama penggunaan dan akuntabilitasnya. Presiden tidak menginginkan ada masalah yang muncul di kemudian hari yang disebabkan oleh Dana Optimalisasi tersebut. Presiden menegaskan K/L yang merasa mendapatkan anggaran baru yang berasal dari Dana Optimalisasi agar dijaga *governance* dan akuntabilitasnya agar tidak muncul masalah baru. Melihat pengalaman lalu, Dana Optimalisasi memunculkan masalah baru, yaitu penggunaannya tidak semestinya sehingga menyeret para pejabat di jajaran pemerintahan dan anggota legislatif. Presiden meminta agar Dana Optimalisasi itu diamankan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Presiden meminta Menteri Keuangan memaparkan penggunaan Dana Optimalisasi dalam APBN 2014. Program K/L yang dilakukan dengan menggunakan Dana Optimalisasi harus sesuai dengan prioritas dan agenda pemerintah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah hingga APBN Tahun Anggaran 2014.

Menteri keuangan mengungkapkan, alokasi Dana Optimalisasi diperuntukkan pada program-program yang diajukan oleh setiap K/L. Besarannya sesuai dengan usulan program yang diajukan. Kemudian program tersebut dibahas oleh K/L dengan masing-masing komisi terkait di DPR-RI. Kemudian hasil keputusan dalam komisi tersebut dibahas kembali oleh K/L dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun Kementerian Keuangan hanya mengecek kelengkapan dokumen program tersebut. M. Chatib Basri menyebutkan kelengkapan utama yakni dokumen resmi pihak yang bertanggung jawab atas realisasi dana itu. Menteri Keuangan tidak menyebutkan dapat merevisi anggaran dari program tersebut.

Dari aspek mekanisme dan prosedur, tidak ada masalah dalam proses penganggaran terhadap Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014, karena semua proses penganggaran APBN harus melalui persetujuan DPR-RI

dalam hal ini Badan Anggaran DPR-RI sebagai alat kelengkapan yang membahas secara detail mengenai anggaran negara. Dalam APBN Tahun Anggaran 2013 yang sedang berjalan, terdapat 28 kementerian dan 58 lembaga negara/lembaga pemerintah non-kementerian. Dari jumlah tersebut, 10 K/L mendapatkan anggaran belanja terbesar yakni: Kementerian Pertahanan Rp83,528 triliun; Kementerian PU Rp83,328 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp79,707 triliun; Kementerian Perhubungan Rp35,269 triliun; Kementerian Agama Rp45,419 triliun; Kementerian Kesehatan Rp36,592 triliun; Kepolisian RI Rp47,109 triliun; Kementerian Sosial Rp16 triliun; Kementerian Keuangan Rp18,831 triliun; Kementerian ESDM Rp17,371 triliun dan Kementerian Pertanian Rp16,380 triliun.

Kemenhan memperoleh Dana Optimalisasi sekitar Rp670 miliar. Sesuai permintaan Mabes TNI dan Panglima TNI, Dana Optimalisasi sebesar itu antara lain dimanfaatkan bagi pengadaan alat komunikasi (alkom) untuk tiga matra TNI dan peralatan selam. Komisi I DPR-RI juga akan mendukung penggunaan dana optimalisasi itu untuk pengadaan dan peremajaan kendaraan operasional bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas hariannya.

Laoly, Anggota DPR-RI menekankan pentingnya Dana Optimalisasi ini untuk memajukan daerah, terutama daerah-daerah tertinggal dan daerah miskin. Penambahan jumlah anggaran optimalisasi ini terutama difokuskan untuk pembenahan infrastruktur yang selama ini menjadi masalah di daerah-daerah.

C. Respons atas Kebijakan Dana Optimalisasi

Kebijakan Dana Optimalisasi ini mendapat respons beragam dari beberapa pemangku kepentingan, seperti KPK dan BPK. Zulkarnaen dari KPK mencurigai pengucuran Dana Optimalisasi sebesar Rp27 triliun itu terkait kebutuhan dana untuk Pemilu 2014. Mengapa di akhir tahun ada dana optimalisasi? Untuk lembaga mana? Siapa yang mengusulkan? Untuk keperluan apa?

Jangan-jangan karena menjelang Pemilu 2014. Zulkarnaen mengaku telah menelusuri asal-usul proyek itu ke Kementerian Keuangan dan Bappenas, tetapi jawabannya dinilai normatif. Terus terang, Dana Optimalisasi bertentangan dengan upaya pencegahan korupsi. KPK akan terus mengawasi penggunaan dana yang luar biasa besarnya itu.

Sementara, Ketua BPK Hadi Poernomo pun khawatir Dana Optimalisasi yang membengkak akan dimanfaatkan untuk Pemilu 2014. Pihaknya akan mencermati penggunaan dana tersebut. Saat ini BPK sedang menyiapkan sistem, agar uang-uang itu tidak diselewengkan. Selain Dana Optimalisasi, BPK juga mencermati anggaran di K/L negara, pemerintah daerah, sampai badan usaha milik negara (BUMN). Langkah yang sudah dilakukan ialah meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan agar proyek-proyek BUMN tidak menggunakan uang tunai. Para pengelola keuangan negara, juga harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Anggota Banggar DPR-RI dari Fraksi PDIP, Dolfie OF Palit, distribusi Dana Optimalisasi dilakukan terbuka dan dihadiri para Anggota Banggar DPR-RI. Penentuan proyeknya juga berdasarkan kriteria pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan anggaran paling besar, Rp9 triliun.

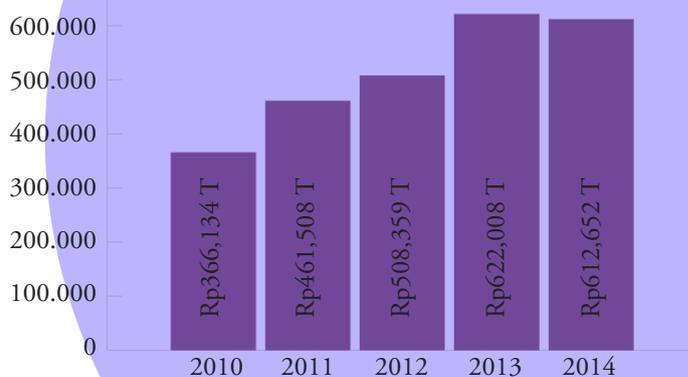
Sorotan publik atas Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 membuat Kemenkeu dan Bappenas menelaah kembali Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) Tahun 2014 yang mendapatkan dana tersebut. Bappenas akan menelaah dengan melakukan pengecekan *output* dan kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013.

Meskipun Banggar DPR-RI yang mengatur distribusi anggaran, program dan proyek yang mendapatkan Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 harus sesuai dengan program prioritas. Pemerintah menyatakan, Dana Optimalisasi idealnya dipergunakan untuk proyek atau program Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang belum tercapai.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana, dana tersebut seharusnya bisa meminimalisasi tidak tercapainya target pemerintah.

Ekonom PT. Samuel Sekuritas, Lana Sulistyansih mengatakan, usaha Dana Optimalisasi untuk pembiayaan infrastruktur dinilai cukup tepat. Kendati demikian, dia menilai kinerja penyerapan belanja infrastruktur pemerintah masih rendah. Dana Optimalisasi adalah dana lebih dari anggaran program pemerintah karena berhasil melakukan penghematan. Jika ditemukan instansi atau seseorang yang mencoba menyelewengkannya maka akan ditindak tegas. Menurut mantan Menteri Keuangan, Agus D. W. Martowardoyo, pemilihan proyek yang diajukan untuk mendapat kucuran Dana Optimalisasi akan dipilih secara selektif. Pemilihannya pun harus melalui diskusi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait.

Grafik Perkembangan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010–2014



Ket: RAPBN Tahun 2014.

Sumber: RAPBN Tahun 2014 dan APBN Tahun Anggaran 2014

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan Dana Optimalisasi yang diusulkan oleh DPR-RI, perlu dilakukan pengawasan baik oleh DPR-RI maupun KPK. BPK juga telah menegaskan akan mengikuti perkembangan penggunaan Dana Optimalisasi ini dalam pelaksanaannya. Sorotan masyarakat atas Dana Optimalisasi adalah adanya transparansi

dan akuntabilitas pemanfaatannya, sebab Dana Optimalisasi jumlahnya tidak sedikit. Hal yang dikhawatirkan adalah timbulnya permasalahan terkait anggaran DPID tahun-tahun sebelumnya.

D. Penutup

Pengawasan terhadap Dana Optimalisasi sebagai bagian dari APBN dapat dilakukan oleh pengawasan internal K/L dan DPR-RI. Tetapi hal yang sangat penting adalah audit BPK dan pengawasan serta penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. BPK dan KPK merupakan institusi yang diamanatkan oleh UUD Negara RI dan undang-undang dalam mengawasi dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. BPK berwenang mengaudit pelaksanaan APBN pada K/L dan menyerahkan hasil audit tersebut kepada DPR-RI untuk ditindaklanjuti. Diharapkan, Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 bermanfaat untuk masyarakat banyak dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

Rujukan:

1. APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013.
2. "Alokasi Dana APBN 2014 Ekstra Hati-Hati," <http://dutaonline.com/16/11/2013/>, diakses 25 November 2013.
3. "APBN Tahun Anggaran 2014," <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef->, diakses 25 November 2013.
4. "Audit Dana Optimalisasi," <http://www.bpk.go.id/web/?p=15517>, diakses 25 November 2013.
5. "Dana Optimalisasi Perlu Pengawasan," *Media Indonesia*, 21 November 2014.
6. "Dana Optimalisasi Untuk Proyek RPJMN," <http://www.indonesiafinancetoday.com/read/54399>, diakses 25 November 2013.
7. "Dana Optimalisasi, Politik Keamanan," <http://www.jurnas.com/news>, diakses 25 November 2013.
8. "Dana Optimalisasi Tahun 2104," <http://www.republika.co.id>, diakses 25 November 2013.
9. "Kelola Dana Optimalisasi Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas," <http://www.kemenkeu.go.id/berita>, diakses 25 November 2013.
10. "KPK Diminta Perketat Pengawasan Penggunaan Dana Optimalisasi," <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/15/2/194926/>, diakses 25 November 2013.
11. "Presiden Ingatkan Penggunaan Dana APBN Tidak Munculkan Masalah Baru," <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/kabar-istana/51668>, diakses 25 November 2013.
12. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
13. RAPBN Tahun Anggaran 2014.
14. "SBY Ingatkan Dana Optimalisasi," <http://www.indonesiaheadlines.com>, diakses 25 November 2013.
15. "SBY Teken RAPBN 2014 Jadi APBN 2014," http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=306934.&catid=18:bisnis&Itemid=95, diakses 25 November 2013.